

Analisis Yuridis
Perihal Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)
(Studi Kasus di Polres dan Kejaksaan Negeri Sungguminasa, Gowa
2009-2014)



Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh

AQMAL PRAYUDI
NIM. 10500110019

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2014

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Agustus 2014

Penyusun,

AQMAL PRAYUDI
NIM: 10500110019

KATA PENGANTAR

Sepatutnyalah sebagai penulis mencurahkan segala puja dan puji syukur atas kehadiran Allah atas berkah dan Rahmatnya sehingga penulis masih dapat merasakan kenikmatan dan Ilmunya sehingga penulisan ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis dan shalawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Atas junjungannyalah Kita manusia dapat merasakan Cahaya Iman dan Islam di muka bumi ini, Serta rasa terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pihak yang turut andil dalam memberikan support sehingga menjadi nilai tersendiri atas rampungnya karya ini, terkhusus kepada;

1. Yang mulia kedua orang tua penulis, Ayahanda dan Ibunda yang karena segala curahan kasih sayang serta segenap perhatiannya kepada penulis sejak dari kandungan hingga waktu yang tak tentu, penulis tak sanggup tuk membalasnya sampai kapanpun.

2. Ayahanda Rektor UIN Alauddin Makassar dan Segenap Pembantu Rektor yang dengan kebijaksanaannyalah, sehingga penulis merasa diri sebagai warga kampus insan akademisi.

3. Ayahanda Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta segenap jajarannya yang telah memberikan kemudahan serta fasilitas dalam hal penyusunan skripsi ini.

4. Ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum, atas bimbingan arahan dan kesabarannya dalam mengarahkan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan semua program yang telah direncanakan.

5. Ayahanda Dr. Hamsir SH.,M.Hum dan Drs. Hamzah Hasan M.HI masing-masing selaku pembimbing penulis, yang senantiasa meyisihkan sebagian waktunya untuk efektifitas penulisan skripsi tersebut.

6. Kakanda serta adinda tercinta yang senantiasa memberikan apresiasi dan sumbangan pemikirannya.

7. Rekan-rekan Ikatan Penggiat Peradilan Semu (I.P.P.S) yang telah memberikan saya semangat dalam penyusunan skripsi ini.

8. Teman – teman KKN Reguler Desa Tinggimae, Kecamatan barombong, Kabupaten Gowa yang telah membuat saya tak pernah putus asa.

Akhirnya, lebih dari segala kemuliaan, penulis panjatkan kepada Ilahi Rabbi Tuhan yang senantiasa membimbing jalan hidup ini untuk meraih segala kebaikan dan kepadanya penulis sandarkan segala pengharapan. Semoga dapat bermanfaat baik terhadap pribadi penulis terlebih kepada khalayak banyak dan menjadi suatu amalan jariyah yang tak ternilai harganya.

Penulis,

Aqmal Prayudi

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK.....	vi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8

BAB II. TINJAUAN TEORITIS

A. Asas – asas dalam hukum acara pidana	10
B. Pengertian dan Tujuan Alat Bukti.....	14
C. Kerangka Konseptual.....	21

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian	23
B. Pendekatan Penelitian	23
C. Sumber Data.....	23
D. Metode Pengumpulan Data.....	24
E. Instrumen Penelitian	24
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	25
G. Pengujian Keabsahan Data.....	25

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan tentang penghentian penyidikan dalam hukum dan Perundang-undangan.....	26
B. Implementasi penghentian penyidikan di polres dan kejaksaan negeri Gowa	49
C. Pandangan Hukum Islam tentang Penghentian Penyidikan...	52

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Nama : Aqmal Prayudi
NIM : 10500110019
Judul : Analisis Yuridis Perihal Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). (Studi Kasus-Kasus di Polres dan Kejaksaan Negeri Sungguminasa, Gowa 2009-2014)

Skripsi ini membahas masalah penghentian penyidikan (studi kasus di Polres dan Kejaksaan Negeri Sungguminasa Gowa). Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui sejauh mana profesionalisme seorang penyidik yang melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus yang ada.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dengan fokus kajian yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) sumber data yaitu data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara di lapangan atau lokasi penelitiandan yang kedua adalah data Sekunder yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui beberapa literatur atau studi kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu observasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kepolisian Resort Gowa dan Kejaksaan Negeri Sungguminasa Kabupaten Gowa mengenai penghentian penyidikan (SP3) tidak terlaksana dikarenakan para penyelidik dan penyidik telah bekerja secara professional dan berintegritas dalam menangani setiap kasus-kasus pidana yang ada.

Setiap penyidik dan penyelidik memiliki tanggung jawab yang dibebankan oleh masyarakat dalam hal penegakan hukum. Oleahnya itu setiap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan penyelidik lebih meningkatkan tanggung jawab yang dimilikinya agar citra penegakan hukum tidak ternodai.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Aqmal Prayudi, lahir dikota Bulukumba tepatnya di Tanete, 03 Agustus 1991 merupakan anak kedua dari 4 bersaudara pasangan Bapak Syahrudin dan Ibu Roslina. Jenjang pendidikannya ditempuh mulai dari SD 189 barugae pada tahun 1998, kemudian melanjutkan kembali pada jenjang

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Bulukumpa pada tahun 2004, lalu kemudian melanjutkan kembali pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2007. Hingga pada tahun 2010 melanjutkan pada jenjang Strata Satu (SI) pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Ilmu Hukum, pada jenjang tersebut disamping aktivitas kuliah juga aktif dalam beberapa organisasi extra maupun intra yakni sebagai Pengurus Himpunan Masiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Hukum pada tahun kedua, pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, dan pernah menjabat di pengurusan Ikatan Penggiat Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar pada tahun 2013 – 2014. Dan menjadi Dewan Pertimbangan Organisasi Ikatan Penggiat Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar pada tahun 2014 – 2015. Serta pernah mengikuti Moot Court Competition Nasional Piala Jhokorda Raka Dherana II di Universitas Udayana Bali pada tahun 2012.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu alat negara penegak hukum. Faktor manusia adalah dominan sebagai sosok yang dipilih dan disaring dari masyarakat dalam suatu wadah yang harus bertanggung jawab demi tegaknya hukum. Tugas anggota polisi diseluruh dunia adalah sama yakni menegakkan hukum, melindungi jiwa manusia dan harta benda.¹

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²

Lebih khusus lagi tugas dan kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum (Penyelidikan dan penyidikan) diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 106 yang berbunyi sebagai berikut :

“Penyidik yang mengetahui, menerima laporan dan/ atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan”.³

¹Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Anggota Polri: Buku Saku* (Jakarta: Polri, 2001), h. 1.

²Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Th. 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Citra Media Wacana, 2009), h. 13.

³Departemen Kehakiman, *KUHAP dan KUHP* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h. 241.

Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti-bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar menemukan dan menentukan pelakunya. Akan tetapi, cara penguraianya dalam KUHAP agak berserakan dalam beberapa bab. Dengan keadaan demikian tentu akan menyulitkan mekanisme penilaian yuridis bilamana mengacu pada hukum yang ada, yaitu UU No. 8 tahun 1981. Khususnya ketentuan mengenai pra peradilan. Karena untuk mempraperadilan diperlukan bukti adanya SP3 yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian.

Keadaan tersebut banyak pihak yang kemudian dirugikan oleh ketidakjelasan kelanjutan penanganan pengaduan ini. Pihak yang paling dirugikan adalah pihak korban yang telah menderita kerugian. Dari sisi manajemen dan administrasi penyelesaian perkara sehingga terjadi penumpukan perkara. Citra kepolisian menjadi tidak baik karena jumlah kasus yang tidak terselesaikan sangat besar.

Fungsi penyidikan dan penuntutan merupakan wewenang pemerintahan dibidang penegakan hukum didalam pelaksanaan fungsi penyidikan dan penuntutan tersebut tidak menutup kemungkinan untuk melahirkan perbuatan sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang.

Menurut Gerson W. Bawengan :

“ tujuan penyidikan adalah untuk mengetahui siapa yang melakukan kejahatan dan mencari pembuktian-pembuktian mengenai kesalahan yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan sesuai dengan fakta-fakta tertentu atau peristiwa- peristiwa tertentu. Menghimpun keterangan-keterangan dimaksud biasanya mengenai :

1. Fakta tentang terjadinya suatu kejahatan.
2. Identitas si korban.
3. Tempat dimana kejahatan itu dilakukan.
4. Bagaimana kejahatan itu dilakukan.
5. Waktu terjadinya kejahatan.

6. Apa yang menjadi motifnya⁴

Sebagaimana dilihat dalam titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh tentang peristiwa pidana yang telah dilakukan. Akan tetapi, sekalipun tersangka menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus dilakukan asas akusator. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat. Dia harus dimulai dari sebagai subjek bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia sebagai tersangka, melainkan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diatur dalam pasal 8 undang – undang no 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

Wewenang dan kewajiban penyidik serta ruang lingkup fungsi penyidikan kurang sistematis pengaturannya, sehingga untuk memahami masalah penyidikan secara sempurna, tidak dapat melihatnya pada bab XIV (tentang penyidikan) saja, tetapi harus melihat dan mengumpulkannya dari bab dan pasal-pasal lain diluar kedua bab yang diterbitkan.

Sedangkan mengenai alasan penghentian penyidikan. Undang-undang menyebutkan secara limitatif alasan yang dapat dipergunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut penting karena untuk menghindari kecenderungan pada diri pejabat penyidik. Dengan penggarisan ini undang-undang mengharapkan supaya dalam mempergunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik mengujinya pada alasan-alasan yang

⁴Gerson W. Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1977), hal. 11

ditentukan. Tidak semuanya pada alasan yang dapat dipertanggungjawab menurut hukum, serta sekaligus pula memberi landasan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah atau tidaknya penghentian penyidikan menurut hukum. Demikian juga bagi pra peradilan, penggarisan alasan-alasan penghentian tersebut merupakan landasan dalam pemeriksaan sidang pra peradilan. Jika ada permintaan pemeriksaan atas sah atau tidaknya penghentian penyidikan.

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana dan atau menerima penyerahan tersangka yang tertangkap tangan wajib segera melakukan tindakan penyidikan. Sejak saat penyidik sudah mulai melakukan tindakan penyidikan, maka penyidik yang bersangkutan wajib segera memberitahukan dimulainya penyidikan itu kepada penuntut umum dengan menggunakan formulir SERSE : A3 yang lazim dinamakan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan).

Apabila penyidik akan melakukan penghentian penyidikan ia harus pula memberitahukan kepada penuntut umum, pemberitahuan penyidik kepada penuntut umum, dianggap kewajiban yang harus dilakukan secara tertulis maupun secara lisan yang disusul kemudian dengan tulisan. Urgensi pemberitahuan tersebut berkaitan dengan hak penuntut umum mengajukan permintaan kepada pra peradilan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan.

Allah berfirman dalam Q.S. An Nisa/4 : 58.



“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.⁵

Hal itu tentunya sesuai dengan slogan Polri yang berbunyi “*Tekadku Pengabdian Terbaik*” dan slogan “*Mengayomi dan melayani masyarakat*”. Pertolongan tersebut harus diberikan secara ikhlas tanpa mengharapkan imbalan, baik secara terang-terangan maupun melalui perilaku atau kata-kata yang menandakan

⁵Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya :: Surya Cipta Aksara, 1993), h. 128.

imbangan. Setiap anggota Polri harus menghindarkan perbuatan tercela, karena hal itu dapat merendahkan jati diri dan martabat polisi. Memelihara pelayanan terbaik adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat secara ikhlas sesuai dengan prosedur pelayanan yang cepat, sederhana, serta tidak bersikap masa bodoh atau mendiamkan adanya laporan masyarakat.⁶

Berdasarkan pada hal tersebut, penulis berkeinginan untuk melakukan penelaahan lebih jauh mengenai tugas dan wewenang aparat penyidik, serta hak-hak tersangka dalam penyidikan, dengan mengangkat judul : “**Analisis Yuridis Perihal Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)**”.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Dalam penelitian peneliti memfokuskan penelitiannya mengenai analisis yuridis perihal surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

C. Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya perumusan masalah dalam rangka untuk mengidentifikasi persoalan yang diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, tegas, terarah, serta tercapainya sasaran yang diharapkan. Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan tentang penghentian penyidikan dalam hukum dan perundang-undangan ?

⁶Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)* (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007), h. 164-166.

2. Bagaimanakah implementasi penghentian penyidikan di Polres dan kejaksaan negeri Sungguminasa, Gowa 2009-2014 ?
3. Bagaimanakah pandangan hukum Islam mengenai penghentian penyidikan?

D. Kajian Pustaka

Menurut Anang Zaki Kurniawan dalam tesisnya yang berjudul Hak Korban dalam Penentuan Penghentian Penyidikan atau Penuntutan Perkara Kekerasan Rumah Tangga, bahwa penghentian penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP yaitu apabila kegiatan penyidikan suatu perkara penyidik tidak memperoleh bukti yang cukup untuk diteruskan ketahap penuntutan, atau peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana dan biasa juga penghentian penyidikan tersebut dikarenakan adanya kepentingan hukum⁷.

Hal ini sejalan dengan KUHAP yang dimana pada pasal 109 ayat (2) yang menjelaskan tentang penyidikan yang sedang berjalan dapat dilakukan penghentian penyidikan oleh penyidik karena tidak cukupnya alat bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan penghentian penyidikan demi hukum, adapun yang dimaksud dengan penghentian penyidikan demi hukum diantaranya *nebis in idem*, tersangka meninggal dunia dan karena peristiwa tersebut telah kadaluarsa.

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan yang menyebutkan bahwa Undang-undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulainya. Hal ini

⁷Anang Zaki Kurniawan, Hak Korban dalam Penentuan Penghentian Penyidikan atau Penuntutan Perkara Kekerasan Rumah Tangga, *Tesis* (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), hal. 109.

ditegaskan dalam pasal 109 (2) yang memberi wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan.⁸

Ketika penyidik ingin melakukan tahap penyidikannya, maka terlebih dahulu penyidik Polri wajib memberitahukan kepada penuntut umum bahwa akan segera dimulainya penyidikan. Hal ini juga sejalan dengan prosedur dalam proses pemeriksaan ditahap penyidikan. Penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan terhadap kasus yang sedang berjalan, sesuai dengan pasal 109 ayat (2).

Terhadap kasus yang telah dihentikan penyidikannya, dan kemudian hari ditemukan alat bukti baru, maka surat perintah penghentian penyidikannya dapat dicabut kembali dan proses pemeriksaan terhadap tersangka dapat dilanjutkan.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pengaturan tentang penghentian penyidikan dalam hukum dan perundang-undangan.
- b. Untuk mengetahui implementasi penghentian penyidikan di polres dan kejaksaan negeri Sungguminasa, Gowa 2009-2014.
- c. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang penghentian penyidikan.

2. Kegunaan Penelitian

⁸Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, h. 150.

- a. Secara teoritis, diharapkan dapat menjadi masukan bagi perkembangan ilmu hukum terutama dalam disiplin ilmu kepolisian dan kejaksaan, juga bagi yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai surat perintah penghentian penyidikan (SP3).
- b. Secara praktis, diharapkan mampu menjadi bahan merumuskan dan menetapkan kebijakan berkenaan dengan tindakan pertanggung jawaban polisi terhadap setiap laporan dan pengaduan masyarakat. Terutama bagi polisi dalam memetakan kesulitan-kesulitan yang dialami agar dapat menanggulangnya sebagai langkah preventif dan represif agar masyarakat selalu dapat merasa puas atas pelayanan dan perlindungan yang didapat sehingga mampu memperbaiki citra kepolisian dan kejaksaan dimasa mendatang di mata masyarakat.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana Indonesia.

Adapun beberapa Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana Indonesia antara lain :

1. Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan.

Sebenarnya hal ini bukan merupakan barang baru dengan lahirnya KUHAP. Dari dahulu, sejak adanya HIR, sudah tersirat asas ini dengan kata-kata lebih konkret daripada yang dipakai didalam KUHAP, untuk menunjukkan asas peradilan cepat banyak ketentuan di dalam KUHAP memakai istilah segera. Pencantuman peradilan cepat didalam KUHAP cukup banyak yang diwujudkan dengan istilah segera itu. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang dianut dalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran undang-undang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Tersebut.

Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim) merupakan bagian dari hak asasi manusia. Begitu pula peradilan bebas, jujur dan tidak memihak yang ditonjolkan dalam undang-undang tersebut.¹

¹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, edisi II* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011) hal. 13.

2. Praduga Tidak Bersalah (*Presumption Of Innocence*)

Asas ini disebut dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP yang berbunyi “ setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan dalam muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”²

Berdasarkan asas praduga tidak bersalah ini, maka bagi seorang sejak disangka melakukan tindak pidana tertentu sampai mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti dari hakim pengadilan, ia masih tetap memiliki hak-hak individunya sebagai warga Negara.³

Jadi apabila terdakwa belum dapat dibuktikan bahwa ia salah masih banyak kemungkinan terdakwa tidak salah. Untuk itu tidak boleh orang cepat-cepat mengatakan bahwa orang yang diperiksa dimuka sidang pengadilan itu sudah salah.

3. Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum.

Pada kepala subparagraf ini telah tegas tertulis “ Pemeriksaan Pengadilan” yang berarti pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan praperadilan tidak terbuka untuk umum. Dalam hal ini dapat diperhatikan pula pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut.

²Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Jakarta : Fajar Interpratama Mandiri 2013), hal.15

³R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2010)hal.200.

“ Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan dan terdakwa anak-anak “ ayat (3).

“ Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum “ ayat (4).

Sebenarnya hakim dapat menetapkan apakah suatu sidang dinyatakan seluruhnya atau sebagiannya tertutup untuk umum yang artinya persidangan dilakukan dibelakang pintu tertutup. Pertimbangan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada hakim.

Hakim melakukan itu berdasarkan jabatannya atau atas permintaan penuntut umum dan terdakwa. Saksipun dapat mengajukan permohonan agar sidang tertutup untuk umum dengan alasan demi nama baik keluarganya. Misalnya dalam kasus pemerkosaan, saksi korban memohon agar sidang tertutup untuk umum agar ia bebas memberikan kesaksianya.

HR dengan arrestnya tanggal 30 Agustus 1909 W. 8903 memutuskan bahwa hakim berdasarkan keadaan persidangan dapat menentukan suatu persidangan tertutup untuk umum. Penetapan hakim bahwa persidangan tertutup untuk umum itu tidak dapat dibanding.

Walaupun sidang dinyatakan tertutup untuk umum, namun keputusan hakim dinyatakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Bahkan undang – undang kekuasaan kehakiman pasal 20 KUHAP pasal 195 tegas menyatakan

“ Semua putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum ”. ⁴

⁴Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hal. 22.

4. Semua Orang Diberlakukan sama di Depan Hakim.

Asas yang umum dianut di Negara-Negara yang berdasarkan hukum ini tegas tercantum pula dalam undang-undang kekuasaan kehakiman pasal 5 ayat (1) dan KUHAP dalam penjelasan umum butir 3a. Pasal 5 ayat (1) tersebut berbunyi ,” Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang “.

5. Peradilan dilakukan oleh Hakim karena Jabatannya dan Tetap.

Ini berarti pengambilan keputusan salah satunya terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan bersifat tetap. Untuk jabatan ini diangkat hakim-hakim yang tetap oleh kepala Negara. Ini disebut dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman pasal 31.

6. Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum.

Dalam pasal 69 sampai dengan pasal 74 KUHAP diatur tentang bantuan hukum tersebut dimana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas. Kebebasan itu antara lain sebagai berikut .

- a. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan.
- b. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
- c. Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu.
- d. Pembicaraan antar penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan Negara.

- e. Turunan berita acara diberikan kepada tersangka/penasihat hukum guna kepentingan pembelaan.
- f. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.⁵

B. Pengertian Pembuktian, Tujuan dan Macam-macam Alat Bukti

Pembuktian dalam dunia peradilan merupakan hal yang harus dilakukan, karena Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang diberikan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa⁶. Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.

Tujuan utama dari alat bukti adalah untuk lebih memperjelas dan menyakinkan hukum sehingga ia tidak keliru dalam menetapkan putusannya dan pihak yang benar tidak dirugikan sehingga dengan demikian keadilan dimuka bumi ini dapat ditegakkan. ⁷Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari

⁵Andi Hamzah . *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hal. 23.

⁶Ardiansyah,"Peranan Visum Et Repertum dalam Pembuktiaan Perkara Pemerkosaan di Pengadilan Makassar, *Skripsi* (Makassar : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2011), hal. 67.

⁷Ardiansyah,"Peranan Visum Et Repertum dalam Pembuktiaan Perkara Pemerkosaan di Pengadilan Makassar, *Skripsi* (Makassar : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2011), hal. 69.

adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang RI No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat 2 yang menyatakan : “Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”.

Dengan adanya ketentuan perundang-undangan tersebut, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana, penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud diatas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 184 ayat 1 yang menyebutkan :

“Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi ;
- b. keterangan ahli ;
- c. surat ;
- d. petunjuk ;
- e. keterangan terdakwa.”⁸

1. Keterangan Saksi

Pengertian umum dari keterangan saksi, dicantumkan dalam pasal 1 butir 27, yaitu “ keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana, yang ia sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.” Dengan

⁸Departemen Kehakiman, *KUHAP dan KUHP* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h. 271.

demikian pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan saja, bukan merupakan keterangan saksi.

Selanjutnya pengertian keterangan saksi dalam proses dicantumkan dalam pasal 185 ayat (1) yaitu “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan.”

Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, kecuali apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Berlainan dengan pemeriksaan yang selama ini berlaku, maka pemeriksaan disidang pengadilan menurut KUHAP ini dimulai dengan pendengaran saksi, meskipun pada permulaan sidang hakim memanggil terdakwa dan menanyakan hal-hal mengenai diri/identitas terdakwa, membacakan surat dakwaan serta menjelaskannya, dan meminta jawaban terdakwa terhadap dakwaan tersebut.

Berdasarkan pasal 160, setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum mengenai dakwaan tersebut, maka pertama-tama yang didengar adalah korban yang menjadi saksi, baru saksi-saksi yang lainnya.

Seperti biasanya, saksi sebelum memberikan keterangannya harus diambil sumpah atau mengucapkan janji, namun jika pengadilan menganggap perlu dapat juga diambil sumpahnya atau mengucapkan janji setelah memberikan keterangannya.

Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan, tetapi menolak kewajiban itu, ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Namun demikian, dalam pasal 168 menentukan

mereka-mereka yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat minta mengundurkan diri saksi, yaitu apabila :

- a. Mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang sama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara terdakwa, saudara ibu dan saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri dari terdakwa meskipun telah bercerai.⁹

Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus memperhatikan tentang :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan alat bukti yang lain.
- c. Alasan yang mungkin digunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

2. Keterangan Ahli

Pengertian umum dari keterangan ahli ini dicantumkan dalam pasal 1 butir 28, yang menyebutkan :

“ keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.¹⁰

⁹Departemen Kehakiman, *KUHAP LENGKAP*, h. 373.

Selanjutnya, dalam pasal 186 menyebutkan pengertian keterangan ahli dalam proses yaitu apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang. Jadi keterangan tersebut harus dinyatakan dalam sidang.

Isi keterangan seorang saksi dan ahli berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu. Dalam hal penyidik atau penuntut umum menganggap perlu ia dapat minta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (pasal 120 KUHAP). Jadi apabila perbuatan seseorang diragukan apakah insaf atas sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan, dalam hal ini perlu mendapat keterangan ahli.¹¹

3. Alat Bukti Surat

Selain pasal 184 yang menyebut alat-alat bukti maka hanya ada satu pasal saja dalam KUHAP yang mengatur tentang alat bukti surat yaitu pasal 187. Pasal itu terdiri dari atas 4 ayat:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana

¹⁰Departemen Kehakiman, *KUHAP LENGKAP*, h. 374

¹¹Suharto RM, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hal. 149.

yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi kepadanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.¹²

4. Alat Bukti Petunjuk

Dalam pasal 188 ayat (1) KUHAP member definisi petunjuk sebagai berikut .

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang kerana persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.¹³

Petunjuk hanya dapat diperoleh dari :

- a. Keterangan saksi.
- b. Surat.
- c. Keterangan terdakwa.¹⁴

5. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa dalam konteks hukum pembuktian secara umum dapatlah disamakan dengan pembuktian secara umum dapatlah disamakan dengan bukti pengakuan atau *confessions evidence*. Menurut Mark Frank, John Yarbrough, dan Paul Ekman, pengakuan tanpa bukti-bukti yang memperkuat suatu kesaksian dengan sendirinya tidak bernilai apa-apa.¹⁵

¹²Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hal. 275.

¹³Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hal. 277.

¹⁴Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan sampai Persidangan*. (Jakarta : PT. Prestasi Pustakaraya, 2010), hal. 110.

¹⁵Eddy O.S Hiariej, *Teori dan hukum Pembuktian* (Jakarta : Erlangga, 2012), hal. 112.

Pada pasal 189 menyebutkan :

“Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya sendiri atau dialaminya sendiri”.¹⁶

Sedangkan keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang, dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus dinilai dengan alat bukti yang lainnya.

Dengan pemeriksaan disidang kemungkinan terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab. Pada pasal 175 menyebutkan bahwa :

“Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan”.¹⁷

¹⁶Departemen Kehakiman, *KUHAP LENGKAP*, h. 376.

¹⁷Departemen Kehakiman, *KUHAP dan KUHP*, h. 268.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual ini menjelaskan pengertian – pengertian dari istilah - istilah yang akan ditulis dalam penulisan ini guna membatasi ruang lingkup dalam penulisan, memberikan persepsi yang sama tentang istilah yang dipakai dalam penulisan yaitu:

“ Analisis “penyelidikan tentang suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yg sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb)

“ Yuridis “ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu menurut hukum dan dari segi hukum. ¹⁸

“ Surat “sesuatu yg ditulis; yg tertulis; tulisan

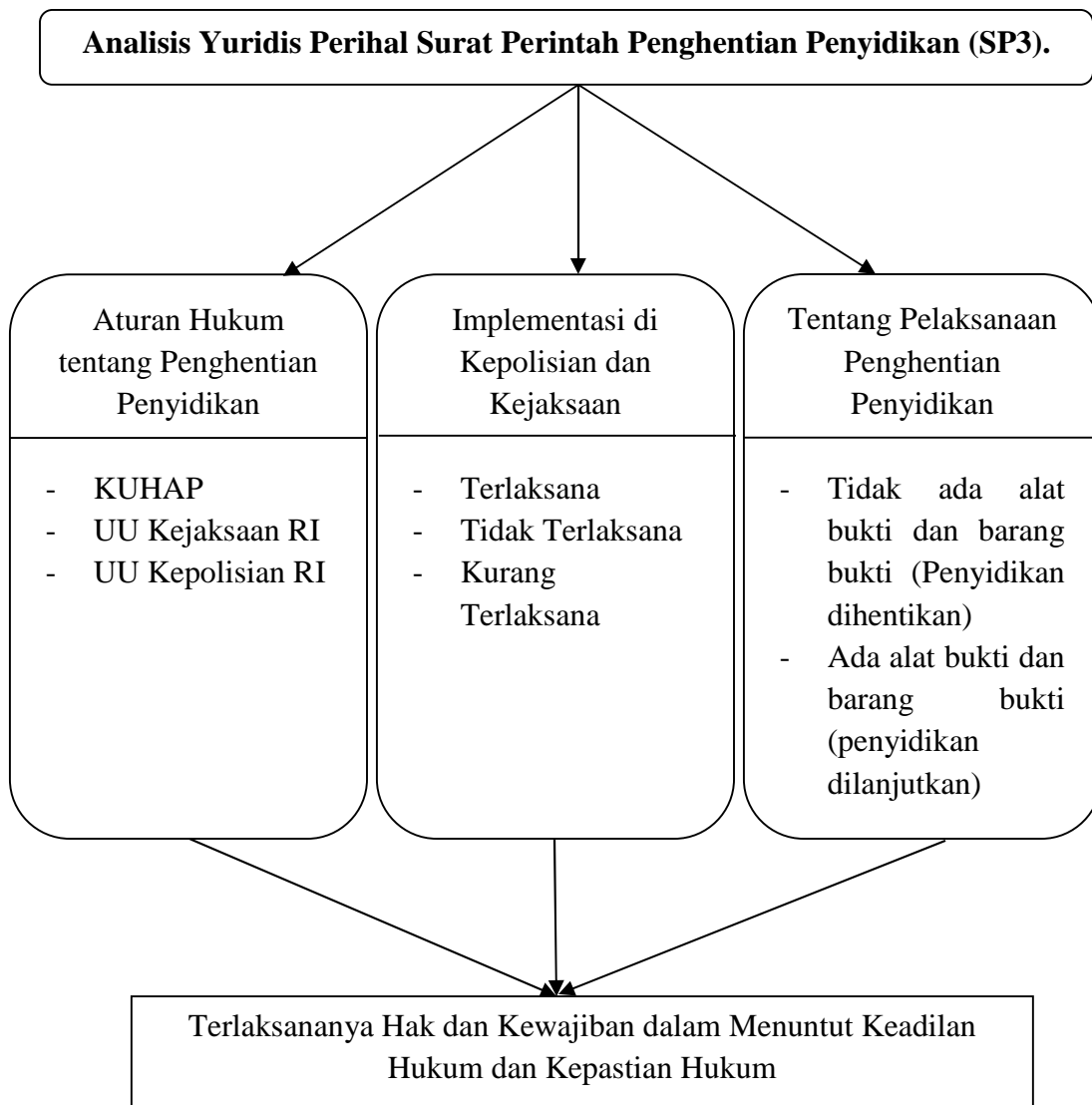
“ Perintah “perkataan yg bermaksud menyuruh melakukan sesuatu; suruhan

“Penghentian” hal menghentikan (mengakhiri, menyetop, dsb)

“Penyidikan” berdasarkan KUHAP Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

¹⁸Bambang Marhijanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini* (Surabaya: Terbit Terang, 1999), h.326.

Berikut kerangka yang menyangkut tentang Analisis Yuridis Perihal Surat Penghentian Penyidikan (SP3).



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dengan fokus kajian yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Secara yuridis yaitu dengan mengkaji peraturan perundangan-undangan yang berkaitan. Secara empiris dengan melihat fakta yang ada di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dipandang dari sudut penerapan hukum.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kepolisian Resort Gowa dan Kejaksaan Negeri Sungguminasa

B. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, secara yuridis yaitu dengan mengkaji peraturan perundangan-undangan yang berkaitan. Secara empiris dengan melihat fakta yang ada di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dipandang dari sudut penerapan hukum.

C. Sumber data.

Dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) sumber data yaitu data primer dan data sekunder, sebagai berikut :

- a) Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara di lapangan atau lokasi penelitian.
- b) Data Sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui

beberapa literatur atau studi kepustakaan, buku – buku referensi yang membahas masalah Kepolisian, Kejaksaan, internet, data arsip dari instansi yang digunakan sebagai tempat penelitian, dan aturan perundang-undangan dan lain sebagainya yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu:

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung pada obyek penelitian

2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada beberapa anggota untuk memberikan keterangan atau data yang diperlukan.

E. Instrumen Penelitian.

Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian saat sudah memasuki tahap pengumpulan data dilapangan adalah wawancara, instrumen penelitian inilah yang akan menggali data dari sumber-sumber informasi

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam rangka mengelola dan menganalisis data yang telah ada dari berbagai sumber, baik dari hasil wawancara, buku-buku maupun dokumen-dokumen. Mengingat data yang dikumpulkan bersifat kualitatif, maka teknik analisa yang digunakan yaitu :

1. Metode induktif, yaitu suatu metode yang bertitik tolak pada fakta yang bersifat khusus untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum.
2. Metode deduktif, yaitu suatu metode yang bertitik tolak dari pengetahuan umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Pengujian Keabsahan Data.

Dalam menguji data dan materi yang disajikan, dipergunakan metode sebagai berikut :

1. Deskriptif yang pada umumnya yang digunakan dalam menguraikan, mengutip atau memperjelas bunyi peraturan perundang-undangan dan uraian umum.
2. Deduktif yang pada umumnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pengaturan tentang Penghentian Penyidikan dalam Hukum dan Perundang-undangan.

1. Penyidikan dan Penyidikan

a. Penyelidikan.

1) Pengertian Penyelidikan

Mengenai pengertian Penyelidikan, secara yuridis normatif diatur dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP, yang menyatakan :

Penyelidik ialah orang yang melakukan “ penyelidikan “. Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyelidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP.¹

Dari penjelasan diatas, penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.²

¹Departemen Kehakiman, *KUHAP dan KUHP* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h. 199.

²Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi II* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h.101.

2) Fungsi dan Wewenang Penyelidik

Fungsi dan wewenang penyelidik meliputi ketentuan yang disebut pada pasal 5 KUHAP, yang dapat dipisahkan ditinjau dari beberapa segi.

a) Fungsi dan Wewenang Berdasarkan Hukum.

Ini diatur dalam pasal 5 KUHAP, berdasar ketentuan ini fungsi dan wewenang aparat penyelidik :

(1) Menerima laporan atau pengaduan

Bertitik tolak dari fungsi ini, apabila penyelidik menerima suatu pemberitahuan atau laporan yang disampaikan oleh seseorang, penyelidik mempunyai hak dan kewajiban untuk menindak lanjuti. Bisa tentang telah atau sedang ataupun diduga akan terjadi suatu peristiwa pidana, penyelidik wajib dan berwenang menerima pemberitahuan laporan (pasal 1 butir 24) atau apabila penyelidik menerima pemberitahuan yang disertai dengan permintaan oleh pihak yang berkepentingan untuk menindak pelaku “tindak pidana aduan” yang telah merugikannya.³

Mengenai laporan atau pengaduan yang dapat diterima :

- a) Jika laporan pengaduan diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
- b) Jika laporan atau pengaduan diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik.
- c) Jika pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus dicatat dalam laporan pengaduan.

³Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, h. 103.

Prinsip setiap laporan atau pengaduan yang disampaikan kepada penyidik wajib diterima dan berwenang untuk menanganinya baik hal itu bersifat pemberitahuan biasa atau laporan, maupun yang bersifat delik aduan (klacht delik). Menurut ketentuan pasal 103 ayat (1),

Apabila penyidik menerima laporan atau pengaduan harus segera melakukan penyelidikan yang diperlukan. Baik hal itu dasar pengetahuannya sendiri maupun berdasarkan laporan atau pengaduan, pejabat penyidik harus segera melakukan tindakan yang diperlukan.

(2) Mencari keterangan dan alat bukti.

Seperti yang telah dijelaskan, tujuan pelebagaan fungsi pnyelidikan dimaksudkan sebagai langkah pertama atau sebagai bagian yang tak terpisah dari fungsi penyelidikan, guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan, dan bahan bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan. seandainya penyidikan dilakukan tanpa persiapan yang memadai, bisa terjadi tindakan yang bertentangan dengan hukum atau terjadi kekeliruan terhadap orang yang disidik.

Akibat yang seperti ini, yang dirugikan bisa menuntut ganti rugi dan rehabilitasi kepada praperadilan. Agar dapat berhasil mengumpulkan fakta, keterangan dan bukti serta sekaligus tidak terjerumus kemuka sidang praperadilan, sudah waktunya penyelidikan dilakukan dengan jalan mempergunakan metode *scientific criminal detection*, yakni metode tehnik dan taktik penyelidikan secara ilmiah. Tidak lagi dengan system kuno main hantam kromo.

(3) Menyuruh berhenti orang yang Dicurigai.

Kewajiban dan wewenang ketiga yang diberikan pasal 5 kepada penyidik, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Wewenang ini wajar, sebab tidak mungkin dapat melaksanakan kewajiban penyelidikan kalau tidak diberi wewenang menyapa dan menanyakan identitas seseorang. Yang kurang jelas dalam pelaksanaan wewenang ini, apakah penyidik harus mendapat surat perintah dari penyidik atau dari atasannya ?

Untuk melakukan tindakan menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan sekaligus menanyakan identitas orang yang ditanyai “tidak perlu” surat perintah khusus atau dengan surat apapun, berdasarkan alasan :

Ketentuan pasal 4 menegaskan, setiap pejabat polisi Negara RI adalah penyidik. Kemudian makna bunyi pasal 4 semakin jelas dapat dipahami jika dihubungkan dengan penjelasan butir 4 pasal 1 yang menegaskan :“Penyidik adalah pejabat polisi Negara RI yang diberi wewenang undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”.⁴Dari bunyi ketentuan ini, dapat dibaca bahwa KUHAP sendiri telah member wewenang yang lahir dari undang-undang ini kepada penyidik untuk melaksanakan kewajiban dan wewenang penyelidikan yang ditentukan pasal 5 ayat (1) tanpa surat perintah. Akan tetapi seperti yang telah berulang kali kita tegaskan, dalam melaksanakan fungsi dan wewenang itu penyidik harus sopan dan tidak merendahkan martabat orang yang dicurigai.

Persoalan kedua yang bisa timbul sehubungan dengan wewenang menyuruh berhenti dan menanyakan identitas orang yang dicurigai. Bagaimana halnya jika orang yang dicurigai tidak mengindahkan atau tidak menaati apa yang disuruh dan

⁴Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2010),hal.1.

ditanyai penyidik ? tindakan hukum apa yang dapat dilakukan penyidik jika orang yang dicurigai membantah ? hal seperti ini mungkin dialami penyidik dalam menjalankan kewajibannya.

Jika penyidik mengalami hal seperti itu, tidak ada perbuatan yang dapat diperbuat untuk memaksa orang yang dicurigai itu. Hal ini memang akan merupakan hambatan bagi penyidik melakukan fungsi penyidikan. Sebab bagaimanapun seandainya orang yang dicurigai tidak menaati perintah penyidik, tidak dapat memaksa dengan upaya paksa. Salah satunya jalan yang dapat dibenarkan oleh hukum, pejabat penyidik segera mendatangi pejabat penyidik, untuk meminta surat perintah penangkapan atau surat perintah membawa dan menghadapkan orang yang dicurigai kemuka penyidik. Atau barangkali yang paling efisien, sewaktu penyidik hendak pergi mencegat orang yang dicurigai, penyidik mempersiapkan surat perintah penangkapan atau surat perintah membawa dan menghadapkan kepada penyidik. Persiapan surat-surat perintah itu dimaksud sebagai upaya mengatasi kemungkinan keingkaran orang yang dicurigai mematuhi perintah penyidik. Dengan disiapkan surat perintah, penyidik tidak perlu lagi membuang waktu meminta surat perintah. Segera setelah adanya keingkaran orang yang dicurigai, penyidik bisa langsung membawanya untuk dihadapkan kemuka penyidik.

Akan tetapi, persiapan surat perintah yang demikian tidak selamanya dapat disediakan. Persiapan seperti itu baru dapat disediakan, jika sejak semula penyidik sudah merencanakan akan menyelidiki orang tertentu yang sudah dicurigai oleh orangnya, sehingga dapat dibuat surat perintah yang menjelaskan identitas orangnya. Kalau hal itu terjadi tiba-tiba disuatu tempat, tidak mungkin mempersiapkan surat perintah dimaksud kecuali jika kejadian itu bersesuaian dengan ketentuan pasal 102

ayat (2) dalam hal tertangkap tangan. Tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan yang disebut pasal 5 ayat (1) huruf b . jadi, dalam kejadian tertangkap tangan, penyidik dapat melakukan tindakan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat mengambil sidik jari, memotret seseorang, dan membawa atau menghadapkan seseorang pada penyidik tanpa lebih dulu mendapat perintah dari pejabat penyidik.

(4) Tindakan Lain Menurut Hukum.

Kewajiban dan wewenang selanjutnya ialah mengadakan “ tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Sungguh sangat kabur rumusan ini , tidak jelas apa yang dimaksud dengan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Sulit sekali menentukan warna dan bentuk tindakan yang dimaksud dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 tersebut.

Sekalipun diminta bantuan kepada penjelasan, namun belum mampu mempertegas wujud bentuk tindakan yang dapat diraba secara nyata. Mari kita telaah penjelasan pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 berbunyi :

Yang dimaksud tindakan lain adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat :

- a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
- c) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.

- d) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
- e) Kewenangan berdasar Perintah Penyidik.

Kewajiban dan wewenang penyidik yang dibicarakan diatas adalah yang lahir dan inherent dari sumber undang – undang sendiri. Sedang kewajiban dan wewenang dalam hal ini adalah yang bersumber dari perintah penyidik yang dilimpahkan kepada penyidik. Tindakan dan kewenangan undang-undang melalui penyidik dalam hal ini, lebih tepat merupakan tindakan melaksanakan perintah penyidik, berupa :

- (1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
- (2) Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- (3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- (4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.⁵

b. Penyidikan

1) Pengertian Penyidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Penyidik di Kepolisian Resort Gowa, yaitu Bapak Aiptu Muh. Rusli mengatakan bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum, pasal 1 butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat polisi atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang. Sedang penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang – undang untuk mencari serta

⁵Departemen Kehakiman, *KUHAP dan KUHP*, h.204

mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.⁶

Penyidikan mempunyai arti tegas yaitu “mengusut” sehingga dari tindakan ini dapat diketahui peristiwa pidana yang telah terjadi dan siapakah orang yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut ⁷.

2) Pejabat Penyidik

Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 6 dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik adalah :

a) Pejabat Penyidik Polri.

Menurut ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah pejabat polisi Negara. Memang dari segi diferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Cuma agar seseorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi syarat kepangkatan, sebagaimana hal itu ditegaskan dalam pasal 6 ayat (2), menurut pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

⁶Muh. Rusli (40 tahun), Penyidik kepolisian Resort Gowa, *Wawancara*, Gowa, 25 juni 2014.

⁷R.Soesilo, *Taktik dan Tehnik Penyidikan Perkara criminal* (Bogor:Politeia,1980) h. 17.

(1) Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh, harus memenuhi syarat pengangkatan dan kepangkatan :

- (a) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi.
- (b) Atau yang berpangkat Bintara dibawah pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua.
- (c) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI.⁸

Demikian syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat polisi menjadi pejabat penyidik. Dari bunyi ketentuan pasal 2 ayat (2) PP no. 27 tahun 1983, sekalipun pada prinsipnya syarat kepangkatan pejabat penyidik sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua, namun mengingat kurangnya tenaga personel yang belum memadai terutama didaerah-daerah atau disektor kepolisian, Peraturan Pemerintah memperkenankan jabatan penyidik dipangku oleh seorang anggota kepolisian yang berpangkat bintara.

(2) Penyidik Pembantu

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu diatur dalam pasal 3 PP No. 27 tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu :

- (a) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi.
- (b) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a).

⁸ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, h. 111.

- (c) Diangkat oleh badan kepolisian RI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Khusus pengangkatan pegawai negeri sipil di lingkungan Kepolisian menjadi pejabat penyidik pembantu, yang bersangkutan harus mempunyai keahlian atau kekhususan dalam bidang tertentu. Tanpa syarat tertentu, tidak ada alasan atau urgensi untuk mengangkat mereka menjadi pejabat penyidik pembantu. Syarat kepangkatan penyidik pembantu, lebih rendah dari jabatan penyidik. Berdasar hierarki dan organisatoris, penyidik pembantu diperbantukan kepada pejabat penyidik, oleh karena itu kepangkatan mereka harus lebih rendah dari penyidik.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Mereka diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik⁹. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang – undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.

Adapun kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas penyelidikan :

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada dibawah koordinasi dan pengawasan dibawah penyidik POLRI.
- (2) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (pasal 107 ayat (1))

⁹Departemen Kehakiman, *KUHAP dan KUHP*, h. 204.

- (3) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu harus melaporkan kepada penyidiik polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ada ditemukan bukti kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (pasal 107 ayat (2).
- (4) Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah melakukan penyidikan, hasil dari penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahannya kepada penuntut umum dilakukan penyidik pegawai negeri sipil melalui penyidik polri (pasal 107 ayat (3).
- (5) Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan pada penyidik polri, penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik polri dan penuntut umum (pasal 109 ayat (3)).¹⁰

2. Penghentian penyidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Penyidik di Kepolisian Resort Gowa, yaitu Bapak Aiptu Muh. Rusli mengatakan bahwa Sesuai dengan ketentuan pasal 109 ayat (1), penyidik menyampaikan pemberitahuan kepada penuntut umum apabila penyidik telah mulai melakukan tindakan penyidikan. Pemberitahuan ini merupakan pelaksanaan yang harus dilakukan penyidik bersamaan dengan tindakan yang dilakukannya. Sebagaimana yang ditegaskan, pemberitahuan penyidikan kepada penuntut umum, dianggap kewajiban yang harus dilakukan dengan cara tertulis maupun secara lisan yang disusul kemudian dengan tulisan.

¹⁰Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, h. 113.

Urgensi pemberitahuan tersebut berkaitan dengan hak penuntut umum mengajukan permintaan kepada praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Penyidik di Kepolisian Resort Gowa, yaitu Bapak Aiptu Muh. Rusli mengatakan bahwa Undang-undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulainya. Hal ini ditegaskan dalam pasal 109 (2) yang memberi wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan.¹²

Barangkali rasio atau alasan pemberian wewenang penghentian ini, antara lain:

- (1) Untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka dimuka persidangan, untuk apa berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri, terutama bagi tersangka dan masyarakat.
- (2) Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, sebab kalau perkaranya diteruskan, tetapi ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum, dengan sendirinya member hak kepada

¹¹Muh. Rusli (40 tahun), Penyidik kepolisian Resort Gowa, *Wawancara*, Gowa, 25 juni 2014.

¹²Muh. Rusli (40 tahun), Penyidik kepolisian Resort Gowa, *Wawancara*, Gowa, 25 juni 2014.

tersangka / terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasar pasal 95 KUHAP.

a. Alasan penghentian penyidikan

Undang-undang telah menyebutkan secara limitatif alasan yang dapat dipergunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut penting, guna menghindari kecendrungan negative pada diri pejabat penyidik. Dengan penggarisan ini, undang-undang mengaharapkan supaya didalam mem pergunakan wewenang pemberhentian penyidikan, penyidik mengujinya pada alasan-alasan yang telah ditentukan. Tidak semuanya pada alasan yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum, serta sekaligus pula akan memberi landasan perujukan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah tidaknya penghentian penyidikan menurut hukum. Demikian juga bagi praperadilan, penggarisan alasan-alasan penghentian tersebut merupakan landasan dalam pemeriksaan sidang praperadilan, jika ada permintaan pemeriksaan atas sah tidaknya penghentian penyidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, yaitu Bapak Haedar S.H Jaksa Muda di Kejaksaan Negeri Sungguminasa mengatakan bahwa alasan penghentian penyidikan yang disebut pada pasal 109 ayat (2) terdiri dari :¹³

¹³Haedar S.H (35 tahun), Jaksa Muda Kejaksaan Negeri Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 11 Juli 2014.

1) Tidak diperoleh bukti yang cukup.

Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan kedepan sidang pengadilan. Atas dasar kesimpulan ketidak cukupan bukti inilah penyidik berwenang menghentikan penyidikan.

Ditinjau dari satu segi, pemberian wewenang ini membina sikap mental penyidik untuk tidak secara serampangan mengajukan begitu saja hasil penyidikan yang telah dilakukannya. Diharapkan lebih selektif mengajukan setiap kasus yang mereka periksa; apakah cukup bukti atau tidak sebelum perkara dilimpahkan ketangan penuntut umum. Jangan lagi yang dialami selama ini ada atau tidak ada bukti, penyidikan tidak peduli. Pokoknya, sekali tindak pidana mereka periksa, ajukan kepihak penuntut umum untuk diteruskan kepengadilan sekalipun tidak ada bukti yang dipegang membuktikan kesalahan tersangka.

Apakah mungkin untuk menyidik atau memeriksa suatu tindak pidana yang telah pernah dihentikan penyidikan atas alasan tidak cukup bukti? Jelas, mungkin ! penghentian penyidikan atas alasan tidak cukup bukti, sama sekali tidak membawa akibat hapusnya wewenang penyidik untuk menyidik dan memeriksa kembali kasus tersebut. Apabila ternyata kemudian hari penyidik dapat mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan memadai untuk menuntut tersangka, penyidikan dapat dimulai lagi. Alasannya, ditinjau dari segi hukum formal, penghentian penyidikan tidak termasuk kategori nebis in idem. Sebab penghentian penyidikan bukan termasuk ruang lingkup putusan peradilan, dia baru bertarap kebijaksanaan yang diambil pada taraf penyidikan, sehingga yang melekat pada tindakan penghentian penyidikan hanya terbatas pada cacat tidak terpenuhi syarat formal penyidikan.

Untuk memahami pengertian “cukup bukti” sebaiknya penyidik memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan pasal 183 yang menegaskan prinsip “batas minimal pembuktian” (sekurang-kurangnya ada dua alat bukti), dihubungkan dengan pasal 184 dan seterusnya, yang berisi penegasan dan penggarisan tentang alat-alat bukti yang sah dipersidangan di pengadilan. Kepada ketentuan pasal 184 inilah penyidik berpijak menentukan apakah alat bukti yang ada ditangan benar-benar cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka dimuka persidangan. Kalau alat bukti tidak cukup atau memadai, lebih baik menghentikan penyidikan. Tetapi apabila dibelakang hari penyidik dapat mengumpulkan bukti yang lengkap dan memadai, dapat lagi kembali memulai penyidikan terhadap tersangka yang telah pernah dihentikan pemeriksaan penyidikannya.

2) Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.

Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pelanggaran dan kejahatan, dalam hal ini berwenang menghentikan penyidikan. Atau tegasnya, jika apa yang disangkakan bukan kejahatan maupun pelanggaran pidana yang termasuk kompetensi peradilan umum, jadi tidak merupakan pelanggaran dan kejahatan seperti yang diatur dalam KUHP atau dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus yang termasuk dalam ruang lingkup wewenang peradilan umum, penyidikan beralasan dihentikan. Malahan merupakan keharusan bagi penyidik untuk menghentikan pemeriksaan penyidikan. Memang diakui, kadang-kadang sangat sulit menarik garis yang tegas tentang apakah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang, termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana pelanggaran dan kejahatan.

Kesulitan ini sering dijumpai dalam peristiwa-peristiwa yang dekat hubungannya dengan ruang lingkup hukum perdata. Misalnya, antara perjanjian utang-piutang dengan penipuan, sering kreditur mengadukan debitur telah melakukan penipuan kepada penyidik atas alasan tidak melaksanakan pembayaran utang yang telah diperjanjikan. Dalam peristiwa seperti ini, memang seolah-olah keingkaran membayar utang yang dijanjikan, bisa dikonstruksi sebagai penipuan, sehingga apabila aparat penyidik kurang cermat, bisa tergelincir untuk menampung peristiwa peristiwa seperti itu sebagai tindak pidana penipuan dan sebagainya.

Seringkali kita jumpai hal-hal atau peristiwa yang jelas-jelas termasuk ruang lingkup hukum perdata, dijadikan penyidik sebagai tindak pidana. Sebagai salah satu contoh, putusan mahkamah agung tanggal 18 agustus 1983 Reg. No. 645 K/Sip/1982. Dari hasil pemeriksaan penyidikan, penyidik berkesimpulan tersangka telah melakukan tindak pidana penggelapan. Semula tersangka mengadakan persetujuan dengan saksi Hasan untuk menyediakan modal dan tersangka sebagai pelaksana mengendalikan modal usaha. Atas dakwaan pemalsuan tersebut tersangka dijatuhi pidana oleh pengadilan negeri Martapura, dan pada tingkat banding putusan dikuatkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Akan tetapi, pada tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan dengan alasan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara terdakwa dengan saksi adalah perjanjian kerjasama usaha yang termasuk bidang perdata.

3) Penghentian Penyidikan Demi Hukum

Penghentian atas dasar alasan demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang

diatur dalam bab VIII KUHP, sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan pasal 76, 77, 78 dan seterusnya anatara lain :

(a) Nebis in idem

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, yaitu Bapak Haedar S.H Jaksa Muda di Kejaksaan Negeri Sungguminasa mengatakan bahwa seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap mana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia, serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁴

Asas Nebis in idem termasuk salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi hukum dan sekaligus dimaksudkan untuk tegaknya kepastian hukum. Bahwa seseorang tidak diperkenankan mendapat beberapa kali hukuman atas suatu tindakan pidana yang dilakukannya. Apabila terhadapnya telah pernah diputus suatu peristiwa tindak pidana baik putusan ini merupakan pemidanaan, pembebasan ataupun pelepasan dari tuntutan hukum, dan putusan itu telah memperoleh keputusan hukum yang tetap, terhadap orang tersebut tidak lagi dapat dilakukan pemeriksaan, penuntutan dan peradilan untuk kedua kalinya atas peristiwa yang bersangkutan.

(b) Tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHP)

Dengan meninggalnya tersangka, dengan sendirinya penyidikan harus dihentikan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal pada abad modern, yakni kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pelaku yang bersangkutan. Prinsip hukum

¹⁴Haedar S.H (35 tahun), Jaksa Muda Kejaksaan Negeri Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 11 Juli 2014.

ini adalah penegasan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang mengajarkan bahwa tanggung jawab seseorang dalam hukum pidana hanya ditimpakan kepada si pelaku tindak pidananya. Menurut pasal 77 KUHPid kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia¹⁵. Tanggung jawab itu tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Dengan meninggalnya tersangka, penyidikan dengan sendirinya berhenti dan hapus menurut hukum. Penyidikan dan pemeriksaan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris.

(c) Karena kadaluwarsa

Apabila telah dipenuhi tenggang waktu penuntutan seperti yang diatur dalam pasal 78 KUHP, dengan sendirinya menurut hukum penuntutan terhadap pelaku tindak pidana tidak boleh lagi dilakukan. Logikanya, jika terhadap seseorang pelaku tindak pidana terhapus wewenang untuk menuntut di muka sidang pengadilan, tentu percuma melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap orang itu. Karena itu, jika penyidik menjumpai keadaan seperti ini, harus segera menghentikan penyidikan dan pemeriksaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, yaitu Bapak Haedar S.H Jaksa Muda di Kejaksaan Negeri Sungguminasa mengatakan bahwa Tenggang waktu kadaluwarsa yang disebut dalam pasal 78 KUHP, antara lain:

¹⁵Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* (Jakarta : Rajawali Pers 2013), hal.265.

- (1) lewat masa satu tahun terhadap sekalian pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan alat percetakan.
- (2) lewat masa 6 (enam) tahun sebagai tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana denda, kurungan, atau penjara yang tidak lebih dari hukuman penjara selama 3 tahun.
- (3) lewat tenggang 12 tahun bagi semua kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana penjara lebih 3 tahun.
- (4) lewat 18 tahun, bagi semua kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup.
- (5) atau bagi orang yang pada waktu melakukan tindak pidana belum mencapai umur 18 tahun, tenggang waktu kadaluwarsa yang disebut pada poin 1-4 dikurangi sehingga menjadi sepertiganya¹⁶.

Mengenai cara perhitungan tenggang waktu kadaluwarsa, mulai dihitung dari keesokan harinya sesudah perbuatan tindak pidana dilakukan, kecuali mengenai cara-cara perhitungan yang ditentukan pasal 79 KUHP.

Dasar penghapusan hak penuntutan pidana itu adalah bahwa dengan berlalunya waktu yang agak lama, ingatan akan kejadian yang ada telah hilang sehingga kemungkinan pembuktiannya menjadi rumit bahkan alat bukti kemungkinan telah lenyap.¹⁷

¹⁶Haedar S.H (35 tahun), Jaksa Muda Kejaksaan Negeri Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 11 Juli 2014.

¹⁷Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012) hal.102.

b. Pemberitahuan penghentian penyidikan.

Sudah diterangkan, apabila penyidik memulai tindakan penyidikan, kepadanya dibebani kewajiban untuk memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Akan tetapi, masalah kewajiban pemberitahuan itu bukan hanya pada permulaan tindakan penyidikan. Pemberitahuan seperti ini juga merupakan kewajiban pada penghentian penyidikan. Seperti yang ditegaskan oleh pasal 109 (2) KUHP.

- 1) Jika yang melakukan penghentian itu penyidik POLRI, pemberitahuan pemberhentian penyidikan disampaikan kepada penuntut umum dan tersangka atau keluarganya.
- 2) Apabila penghentian penyidikan dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, pemberitahuan pemberhentian harus segera disampaikan kepada penyidik POLRI sebagai pejabat yang berwenang melakukan koordinasi atas penyidikan dan penuntut umum

Bahkan kalau bertitik tolak dari angka 11 Lampiran Kep.MenKeh.No. M.14-PW.03/1983, pemberitahuan pemberhentian penyidikan juga meliputi pemberitahuan kepada penasehat hukum dan saksi pelapor / korban.

3. Upaya Hukum Penghentian Penyidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, yaitu Bapak Haedar S.H Jaksa Muda di Kejaksaan Negeri Sungguminasa mengatakan bahwa Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan ketika terjadi penghentian penyidikan adalah pra peradilan.¹⁸

¹⁸Haedar S.H (35 tahun), Jaksa Muda Kejaksaan Negeri Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 11 Juli 2014.

a. Pengertian Praperadilan

Secara etimologi, pra berarti sebelum, dan peradilan berarti proses mengadili di pengadilan. Jadi praperadilan dilihat dari pengartian kata per kata adalah proses yang dilakukan sebelum proses atas suatu kasus yang akan dipersidangkan di pengadilan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (10) KUHAP, praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang acara pidana mengenai :

- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka/penyidik/penuntut umum, demi tegaknya hukum dan keadilan;
- 3) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

b. Ruang Lingkup Praperadilan

Menurut Pasal 77 KUHAP, ruang lingkup kompetensi lembaga praperadilan disebutkan seperti berikut :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- 1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

- 2) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.¹⁹

Dan berdasar dari pasal-pasal tersebut, maka wewenang yang dimiliki oleh hakim praperadilan yang diberikan oleh undang-undang hukum acara pidana adalah sebagai berikut:

- (1) Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penangkapan;
- (2) Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penahanan;
- (3) Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan;
- (4) Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian penuntutan.
- (5) Menetapkan ganti rugi atau rehabilitasi terhadap mereka yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

c. Yang Berhak Mengajukan Permohonan Praperadilan

Siapa yang dapat mengajukan permohonan pemeriksaan Praperadilan mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dapat dikelompokkan menjadi pihak-pihak sebagai berikut :

- 1) Tersangka, Keluarganya, atau Kuasanya Tersangka, keluarganya, atau kuasanya berhak mengajukan permohonan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan.

¹⁹Departemen Kehakiman, *KUHAP dan KUHP*, h. 229.

Demikian menurut ketentuan Pasal 79 KUHAP, yang menyatakan bahwa yang berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, bukan hanya tersangka saja, tetapi dapat diajukan oleh keluarga atau penasehat hukumnya.

2) Penuntut Umum dan Pihak Ketiga yang Berkepentingan

Menurut Pasal 80 KUHAP, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan apabila instansi penyidik menghentikan pemeriksaan penyidikan. Sedangkan yang dimaksud pihak ketiga yang berkepentingan dalam hal ini adalah saksi yang menjadi korban dalam peristiwa pidana yang bersangkutan.

3) Penyidik atau Pihak Ketiga yang Berkepentingan.

Dalam hal dilakukannya penghentian penuntutan oleh penuntut umum maka penyidik dan pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penuntutan tersebut. Hal ini berkebalikan dengan permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penyidikan yang diajukan oleh penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan.

4) Tersangka, Ahli Warisnya, atau Kuasanya

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (2) KUHAP yang menjelaskan bahwa tersangka dan ahli warisnya atau penasihat hukumnya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Praperadilan atas alasan sebagai berikut :

- a) Penangkapan atau penahanan yang tidak sah;
- b) Penggeledahan atau penyitaan tanpa alasan yang sah;

- c) Karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

5) Tersangka atau Pihak Ketiga yang Berkepentingan

Menuntut Ganti Rugi Dalam ketentuan Pasal 81 KUHP, tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Praperadilan atas alasan sahnya penghentian penyidikan maupun penuntutan. Apabila Praperadilan memutuskan suatu penghentian penyidikan ataupun penuntutan adalah sah maka memberikan alasan bagi tersangka dan pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Praperadilan.

B. Implementasi Penghentian Penyidikan Di Polres dan Kejaksaan Negeri Sungguminasa Kabupaten Gowa.

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa di Kepolisian Resort Gowa dan Kejaksaan Negeri Sungguminasa Kabupaten Gowa mengenai penghentian penyidikan (SP3) tidak terlaksana dikarenakan para penyelidik dan penyidik telah bekerja secara profesional dan berintegritas dalam menangani setiap kasus-kasus pidana yang ada.

Dalam proses penyidikan yang dilakukan penyidik terhadap tersangka yang diduga tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya seharusnya tidak berbeda dengan proses penyidikan biasa. Misalnya dalam proses pemeriksaan tersangka atau saksi, apabila terdapat dugaan tersangka memiliki gangguan jiwa maka dapat dilakukan observasi selama 2 minggu (14 hari). Apabila hasil observasi menunjukkan tersangka memiliki gangguan jiwa maka pihak penyidik dapat

mengeluarkan surat pembantaran, dan kembali setelah sembuh. Namun pada pelaksanaannya hampir seluruh kasus terhenti setelah tersangka dibantarkan. Karena penanganan yang sering kali tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan bertentangan dengan asas-asas hukum pidana maka penanganan kasus tersangka yang memiliki gangguan jiwa sering kali tidak termonitor dengan baik.

Terhadap fakta-fakta diatas, maka DPR selaku pembuat Undang-Undang perlu adanya defenisi yang jelas mengenai orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan ketentuan yang jelas mengenai penanganan terhadap pelaku tindak pidana yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika penyidik berhak untuk melakukan penghentian penyidikan terhadap tersangka yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka sebaiknya alasan penghapusan pidana dapat dimasukkan menjadi salah satu alasan dapat dilakukannya penghentian penyidikan.

Untuk lembaga kepolisian hendaknya dapat membuat petunjuk pelaksanaan penyidikan terhadap tersangka yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan melakukan tugasnya sesuai prosedur yang berlaku tanpa menyalahi ketentuan yang ada dan dengan penuh tanggung jawab.

Arti dan tujuan kehidupan masyarakat adalah mencari dan mewujudkan ketentraman dan keadilan yaitu kehidupan bersama antara sesama anggota masyarakat yang dituntun dan dibina dalam ikatan yang teratur dan layak, sehingga lalu lintas pergaulan masyarakat yang bersangkutan berjalan dengan tertib dan lancar. Agar dapat terwujud tata pergaulan yang tertib dan lancar, satu-satunya cara yang harus ditempuh ialah dengan jalan menegakkan ketertiban dan kepastian hukum

dalam setiap aspek kehidupan, sesuai dengan kaidah-kaidah dan nilai hokum yang telah disepakati.

Secara garis besar fungsi hukum dan aparat penegakan hukum, pada umumnya bertujuan :

1. Agar terbina hubungan yang serasi antara Negara dan masyarakat atau masyarakat dengan warga Negara dan warga masyarakat.
2. Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang disertai tugas, harus menjamin kepastian hukum demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Ketidakpastian hukum, akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan social.
3. Untuk membina peningkatan suasana kehidupan masyarakat yang aman dan tertib, atau tercipta stabilitas keamanan dan ketertiban kehidupan masyarakat hukum dan undang-undang harus ditegakkan dengan tegas dan tepat.

Titik senral dalam memeriksa dan menyelesaikan kasus tindak pidana harus memahami manusia dan kemanusiaan yang wajib dilindungi harkat martabat kemanusiaanya. Sekalipun kita menginsafi bahwa tujuan tindakan penegak hukum untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan masyarakat, penegak hukum tidak boleh mengorbankan hak dan martabat tersangka/terdakwa. Atau juga sebaliknya, demi untuk melindungi dan menjunjung harkat martabat tersangka/terdakwa tidak boleh dikorbankan kepentingan masyarakat.

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah SWT...²¹.

b. Q.S. Ali-Imran/3 : 81



Terjemahnya :

“Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari para Nabi: “Sungguh, apa saja yang Aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah,...”. Allah berfirman: “apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianKu terhadap yang demikian itu?” mereka menjawab: “Kami mengakui.” Allah berfirman: “Kalau begitu saksikanlah (hai para Nabi) dan Aku menjadi saksi (pula) bersama kamu.”²²

Berdasarkan beberapa hadis Rasulullah bahwa pembuktian zina dengan pengakuan harus dilakukan empat kali. Ini diqiyaskan kepada empat orang saksi, juga didasarkan atas hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ أَمَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَوَّرَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَزَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى مَرَدَّدَ عَلَيْهِ أَمْرًا مَرَّاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَمْرًا شَهِدَاتٍ دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْكَ جُنُودُ قَالَ لَا قَالَ فَبُيِّنَ لِي حُصْنٌ قَدْ بَعَثَ قَدْرَ شَيْءٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذْهَبُوا بِهِ فَأَمْرُ جُمُوعِهِ...²⁴

Artinya:

'Dari Abu Hurairah ra. menceritakan bahwa pada suatu hari datanglah seorang laki-laki kepada Nabi saw. yang sementara berada di masjid untuk menyatakan bahwa ia telah berbuat zina. Terhadap pengaduan tersebut, Nabi tidak memperhatikannya, kemudian laki-laki itu menyatakan kedua kalinya bahwa ia telah berzina. Dan kembali Nabi saw. tidak memperhatikannya. Hal itu berulang sampai laki-laki itu datang yang keempat kalinya. Tatkala ia telah menunjukan kesaksian (pengakuan) atas kesalahannya sebanyak empat kali, Maka *Nabi memberikan perhatiannya. Nabi saw. bertanya: apakah kamu dalam keadaan sehat akal?*", *dijawab: ya*. *Nabi bertanya: lagi, apakah kamu telah menikah?* *T', dijawab: "ya", maka Nabi pun memberitahukan agar laki-laki itu dijatuhi rajam.*²³

Hadis inilah yang dijadikan dasar oleh para fuqaha menetapkan jumlah pengakuan zina karena pengaduan dan pezina sendiri harus sebanyak empat kali. Namun demikian, seperti yang dikemukakan oleh Ibn Rusyd terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. imam AbU Hanifah dan sahabat-sahabatnya, demikian Abi Lailah berpendapat bahwa tidak wajib dihad kecuali dengan pengakuan sebanyak empat kali secara berulang-ulang. Abu Hanifah menambahkan bahwa pengakuan itu harus disampaikan kepada majelis yang terpisah. Sedangkan Imam Mâlik dan Syafii menyatakan pengakuan itu cukup sekali saja,²⁴ karena pengakuan merupakan suatu

²³Imam al-Buhari, *Sahih Buhari*. Juz. VIII {Beirut: Dar al-Kitab al-Islamiyah, 1992), h. 336.

²⁴Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid, juz II* (Mesir: Mustafa al-Babiy alHalâbiy, 1960), h.

berita, dan informasi itu tidak memerlukan pengulangan bagi. ulama yang berpegang pada pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid bahwa Nabi saw. bersabda:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجَرَنِيِّ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَانِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا اقْضِ بَيْنَنَا بَكْتَابِ اللَّهِ وَقَالَ الْآخَرُ دَوِّبُوْهُمَا أَجَلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَذِنَ لِي فِي أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ إِنْ ابْنِ ابْنِ عَسِيفَةَ عَلَى إِذَا فَتَى بِأَمْرَاتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلِيَّ ابْنَ أَبِي الرَّجْمِ فَافْتَدَيْتُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَجَارِلَةٍ إِثْمَ لِي سَأَلْتُ أَلَّ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلِيَّ ابْنَ جِلْدِ مِائَةٍ وَتَغْرِيبِ عَامٍ وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَمَّ أَمْرَاتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَا غَنَمُكَ وَجَارِلَتُكَ فَردِّ إِلَيْكَ وَجِلْدُ ابْنِهِ مِائَةٍ وَغَوْرَتُهُ عَامًا وَأَمْرَاتُهَا أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةً الْآخَرَةَ فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَأَوْجَمَهَا فَأَعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Salamah ia berkata; telah memberitakan kepada kami 'Abdurrahman Ibnul Qasim dari Malik dari Ibnu Syihab dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhani keduanya mengabarkan kepadanya, bahwa dua orang laki-laki yang berselisih mengadu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Salah seorang dari keduanya berkata; "Hukumilah antara kami berdua sesuai dengan Kitabullah, " yang lain berkata -dan ini yang lebih fakih di antara mereka berdua-, "Benar, ya Rasulullah. Tapi izinkanlah aku untuk berbicara, laki-laki itu pun berkata; "Sesungguhnya anakku adalah seorang buruh yang bekerja untuk orang ini, lalu anakku berzina dengan isterinya. Orang-orang mengabariku bahwa hukuman bagi anakku adalah rajam. Maka aku menebusnya dengan seratus ekor kambing dan seorang budak wanita milikku. Setelah itu aku bertanya kepada ahli ilmu, mereka mengabariku bahwa hukuman bagi anakku adalah cambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Sementara hukuman rajam untuk isterinya." Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku ada dalam tangan-Nya, sungguh aku akan menghukumi kalian dengan Kitabullah. Kambing dan budak

itu akan dikembalikan lagi kepadamu." Kemudian beliau mencambuk anaknya seratus kali dan mengasingkannya selama satu tahun. Lalu beliau memerintahkan Unais agar membawa wanita itu: "Jika ia mengaku maka rajamlah." Wanita itu pun mengaku dan akhirnya dirajam.²⁵

Dalam hadis ini, rajam dikaitkan dengan pembuktian yang semata-mata berupa pengakuan. Sebab Unais sendiri tidak menyebut berapa kali wanita itu mengucapkan pengakuannya. Padahal Rasulullah saw. menanggukkan rajam kepada Ma'iz sampai mengakui empat kali. Hal ini dimaksudkan karena Rasulullah meragukan kesehatan Ma'iz. Bahkan Ma'iz dikembalikan kepada sukunya untuk ditanyakan apakah akal nya sehat dan setelah itu bam dirajam.

Pengakuan disyaratkan harus terinci dalam menjelaskan perbuatannya supaya tidak menimbulkan *syubhat* seperti yang tergambar pada kasus Ma'iz. Bahkan menurut ar-Rahman seperti yang dikutip oleh Haliman, bahwa pengakuan mempunyai dua syarat: 1) pengakuan mestilah dilakukan secara terang, karena itu jika orang bisu melakukan pengakuan dengan tulisan ataupun dengan isyarat, ia tidak dikenakan hukum had, 2) pengakuan tidak menunjukkan kedustaan, seperti jika seseorang mengaku berzina, tapi ternyata kemaluannya puntung, ataupun jika perempuan. ternyata kemaluannya tersumbat, maka dengan demikian wajib adanya *syubhat* dan hukuman tercegah karenanya²⁶

Mengingat kasus kejahatan zina amat sulit dibuktikan dengan alat-alat bukti lain, maka diperlukan pengakuan empat kali, tetapi jika ada bukti-bukti lain yang menguatkan pengakuan, misalnya seseorang perempuan telah mengandung dan dengan demikian pengakuan sebanyak empat kali tidak diperlukan lagi, karena ada

²⁵Imam al-Buhari, *Sahih Buhari*. Juz. VIII {Beirut: Dar al-Kitab al-Islamiyah, 1992), h. 344.

²⁶Uhat Haliman, *Hukuman Pidana Syariah Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 394

bukti-bukti lain yang menguatkan pengakuan yang diberikan. Peristiwa Ghamidiyah merupakan contoh kasus yang tidak memerlukan pengakuan sebanyak empat kali.

Dengan demikian, pengakuan satu kali dapat diterima, jika ada alat-alat bukti lain sebagai penguat. Tetapi dalam hal tidak ada alat bukti lain, maka pengakuan tetap harus dilakukan empat kali.

Alat bukti pengakuan dalam hal pembuktian hanya berlaku bagi orang yang menyatakan pengakuan itu. Apabila dalam pengakuannya disebutkan nama orang lain yang juga melakukan tindak pidana maka hal tersebut tidak termasuk kedalam pengakuan, melainkan persaksian. Walaupun demikian, pengakuan sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama dan fuqaha, merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan yang paling kuat dibandingkan alat bukti yang lainnya. Hal ini didasarkan pada prinsip dasar bahwa manusia tidak akan melakukan kebohongan yang akan merugikan dirinya terkait pengakuan ini.

Penggunaan pengakuan sebagai alat bukti memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengakuan tersebut. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah berupa pengakuan yang jelas, terperinci, pasti, serta tidak dapat menimbulkan tafsiran lain terkait tindak pidana yang dilakukannya. Selain itu juga dalam pengakuan tersebut perlu disebutkan hal-hal yang berkaitan seperti waktu, tempat, cara melakukannya, dan lain sebagainya sehingga pengakuan tersebut memiliki suatu kejelasan dan kepastian tanpa adanya dugaan atau tafsiran tindak pidana di luar yang dilakukan olehnya. Pengakuan juga harus disampaikan tanpa adanya paksaan dan disampaikan oleh orang yang memiliki akal yang sehat.²⁷

²⁷Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Hal.230.

2. Persaksian (*syahadat*):

Menurut Wahbah Zuhaili definisi dari persaksian adalah “persaksian adalah suatu pemberitahuan (pernyataan) yang benar untuk membuktikan suatu kebenaran dengan lafazd syahadat di depan pengadilan”.²⁸























Persaksian merupakan salah satu alat bukti yang penting dalam pembuktian hukum pidana islam. Hal ini dikarenakan persaksian dapat menjadikan pembuktian lebih objektif karena adanya saksi yang menguatkan. Saksi juga menjadi kunci dalam pembuktian dalam suatu tindak pidana apabila pelaku tidak mengaku. Selain itu apabila salah satu saksi memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangan pelaku maka hal tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan terkait pembuktian kasus tersebut oleh hakim. Tanpa adanya saksi ini pada umumnya akan sulit dibuktikan bahwa seseorang telah melakukan suatu jarimah.







Yang menjadi dasar hukum alat bukti persaksian ini antara lain:

- a. Q.S. Al-Baqarah/2 : 282:



²⁸Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Hal.231.

Terjemahnya :

“ Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki maka (boleh) seseorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seseorang lupa, yang seseorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.²⁹

b. Q.S. Ath-Thalaaq/65 : 2























































































































































































²⁹Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 70.

Terjemahnya :

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.³⁰

c. Hadist Riwayat Nasa'i:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ ابْنَ مَحِيصَةَ الْأَصْغَرَ أَصْبَحَ قَتِيلًا عَلَى أَبْوَابِ
خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِمْ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ أَدْفَعْهُ إِلَيْكُمْ
بِرُمْتِهِ

Artinya :

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ma'mar telah menceritakan kepada kami Rauh bin 'Ubadah telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Al Akhnas dari 'Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Ibn Muhayyishah kecil terbunuh di pintu gerbang Khaibar, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Datangkan dua orang saksi atas siapa yang membunuhnya, maka aku akan menyerahkannya kepada kalian dengan tali yang mengikatnya."³¹

Terkait syarat saksi harus beragama islam ada perbedaan pendapat. Menurut Fuqaha pada prinsipnya, seorang non muslim tidak boleh menjadi saksi terhadap orang muslim. Namun dalam situasi tertentu seperti tidak adanya saksi selain non muslim tersebut, maka menurut imam ahmad, itu dapat diterima.³² Agar persaksian tersebut dapat diterima maka terdapat beberapa syarat-syarat yang bersifat umum

³⁰Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 945.

³¹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Hal.232.

³²Hadi Daeng Mapuna, *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Makassar : Alauddin University Press, 2013), hal. 132.

yang harus dipenuhi oleh saksi antara lain adalah dewasa, berakal, kuat ingatannya, dapat berbicara, dapat melihat, adil, dan islam.

3. Sumpah (*Qasamah*)

Berdasarkan arti bahasa *qasamah* adalah sumpah. Sedangkan menurut Hanafiyah mendefinisikan qasamah “Dalam istilah syara’, qasamah digunakan untuk arti sumpah dengan nama Allah SWT karena adanya sebab tertentu, dengan bilangan tertentu, untuk orang tertentu yaitu si terdakwa dan menurut cara tertentu”. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa qasamah adalah sumpah yang dilakukan berulang-ulang yang dilakukan oleh keluarga korban untuk membuktikan pembunuhan terhadap keluarganya yang dilakukan oleh tersangka, atau dilakukan oleh tersangka untuk membuktikan bahwa ia bukan pelaku pembunuhan. Para ulama sepakat bahwa penggunaan qasamah ini hanya untuk tindak pidana pembunuhan saja.

³³ Dasar hukum dari sumpah ini adalah hadist Nabi Muhammad SAW yaitu:

Hadist Riwayat Ahmad, Muslim, Nasa’i:

حدثنا **أَحْمَدُ** قَالَ حَدَّثَنَا **لَيْثٌ** قَالَ حَدَّثَنَا **عُقَيْلٌ** عَنْ **ابْنِ شِهَابٍ** عَنْ **أَبِي سَلَمَةَ** بْنِ **عَبْدِ**
الْوَحْمَنِ وَ**سُلَيْمَانَ** بْنِ **يَسَارٍ** عَنْ **إِنْسَانَ** مِنَ **الْأَنْصَارِ** مِنْ **أَصْحَابِ النَّبِيِّ** صَلَّى **اللَّهُ** عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ أَنَّ **الْقِسَامَةَ** أَنْتَ، فِي **الْجَاهِلِيَّةِ** قِسَامَةُ **الدَّمِ**.

Artinya :

³³Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Hal.235.

Telah menceritakan kepada kami Hajjaj berkata; telah menceritakan kepadaku Laits berkata; telah menceritakan kepadaku 'Uqail dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman dan Sulaiman bin Yasar dari salah seorang dari Anshar dari sahabat Nabi Shallallahu'alaihiwasallam sesungguhnya Al Qasamah (bersumpahnya lima puluh orang laki-laki untuk membuktikan bahwa seseorang tidak terlibat tindak pembunuhan) pada masa Jahiliyah³⁴

Penggunaan qasamah seperti yang telah disebutkan diatas bahwa para ulama telah sepakat hanya untuk kasus pembunuhan saja. Namun yang menjadi perdebatan adalah kapan saat digunakannya qasamah ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa qasamah dilakukan ketika pelaku pembunuhan tidak diketahui. Sedangkan pendapat kedua adalah ketika pelaku pembunuhan diketahui karena adanya petunjuk yang mengarah kepadanya.

4. Petunjuk (*Qarinah*):

Qarinah atau petunjuk menurut definisi dari Wahbah Zuhaili adalah “*Qarinah* adalah setiap tanda (petunjuk) yang jelas yang menyertai sesuatu yang samar, sehingga tanda tersebut menunjukkan kepadanya”³⁵

Contoh salah satu bentuk dari *qarinah* adalah hamilnya seorang perempuan yang belum menikah dalam tindak pidana zina, bau alkohol pada mulut seseorang dalam *jarimah* meminum minuman keras. Terwujudnya *qarinah* ini harus memenuhi beberapa hal yaitu terdapat suatu keadaan yang jelas dan diketahui layak untuk dijadikan dasar dan pegangan. Selanjutnya adalah terdapat hubungan yang menunjukkan adanya keterkaitan antara keadaan yang jelas dan yang samar.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pembuktian dalam hukum pidana islam tidak sama antara satu tindak pidana dengan tindak pidana yang lainnya.

³⁴Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Hal.236.

³⁵Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Hal.244.

Hal ini disebabkan untuk tiap kasus sistem pembuktiannya berbeda didasarkan pada bentuk tindak pidananya. Yang menjadi kesamaan antara satu tindak pidana dengan tindak pidana yang lainnya dalam pembuktian adalah jenis alat bukti yang digunakannya. Selain itu perbedaan dalam pembuktian pidana islam juga dibedakan berdasarkan jenis tindak pidananya yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qisas diyat*, dan *jarimah ta'zir*. Khususnya *jarimah hudud* terdapat perbedaan dalam syarat dan ketentuan alat bukti yang digunakan seperti pembuktian *jarimah zina*. Dalam *jarimah zina* saksi yang harus dimunculkan minimal empat orang laki-laki, berbeda dengan syarat minimal saksi pada *jarimah* lainnya yang hanya mensyaratkan minimal dua orang laki-laki. Berikut adalah contoh pembuktian dalam beberapa jenis tindak pidana dalam Islam:

a) Tindak pidana pencurian:

Ada beberapa alat bukti dalam tindak pidana pencurian menurut hukum Islam, yaitu :

- (1) Dengan Persaksian, dalam hal ini cukup dengan dua orang saksi.
- (2) Dengan Pengakuan, dalam hal ini menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'I, dan Imam Ahmad cukup satu kali, meskipun demikian ulama lain ada yang mensyaratkan dua kali.
- (3) Dengan sumpah, dikalangan mazhab syafi'i, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa pencurian dapat dibuktikan dengan sumpah, namun pendapat yang lebih rajah, menyatakan bahwa alat bukti dalam tindak pidana pencurian hanya saksi dan pengakuan.
- (4) Qarinah, tanda – tanda yang menunjukkan bahwa dia telah mencuri.³⁶

³⁶A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000) hal. 80.

b) Tindak Pidana Zina

Pembuktian untuk tindak pidana perzinahan dilakukan dengan tiga jenis alat bukti yaitu pengakuan, persaksian, dan petunjuk.

(1) Dengan Persaksian

Pada prinsipnya alat bukti saksi dalam pembuktian tindak pidana perzinahan memiliki syarat yang sama dengan alat bukti saksi pada umumnya. Namun ada beberapa perbedaan seperti jumlah saksi yang harus dihadirkan. Dalam tindak pidana zina jumlah saksi minimal adalah empat orang. Empat orang saksi ini harus melihat langsung kejadian. Mereka harus melihat kejadian dengan mata kepala mereka sendiri. Tidak bisa hanya mendengar kejadian tersebut dari orang lain, karena nantinya akan menimbulkan keraguan (*syubhat*) yang dapat menyebabkan hukuman hudud gugur. Dasar hukum dari syarat saksi ini adalah surat An-Nisa ayat 15 yang isinya adalah “dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya)...”

(2) Dengan pengakuan

Alat bukti memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi , antara lain adalah pengakuan harus dinyatakan empat kali dan terperinci sehingga menghilangkan *syubhat* (keragu-raguan). Namun pada prinsipnya sama dengan alat bukti pengakuan pada umumnya.

(3) Dengan *Qarinah* (petunjuk)

Pembuktian menggunakan petunjuk dalam tindak pidana zina dapat berupa hamilnya seorang wanita yang tidak bersuami.

Terkait dengan beban pembuktian kepada siapa harus di bebaskan, maka dalam sistem pembuktian hukum islam beban pembuktian di bebaskan kepada penggugat. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu diambil dari lahirnya. Karenanya dalam hal ini penggugat harus membuktikan apa yang telah ia gugat. Hal ini dapat dari syarat saksi dalam kasus perzinahan yang mengharuskan bahwa penggugatlah yang harus menghadirkan saksi. Seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat An-Nissa ayat 15.

Demikian pembuktian dalam hukum pidana islam, Apabila gugatan tersebut tidak dapat dibuktikan maka meskipun apa yang gugatan sebenarnya memang terjadi atau merupakan fakta maka tergugat tidak dapat dihukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar Hukum dan Perundang –undangan tentang penghentian penyidikan diatur pada pasal 109 ayat (2) KUHAP terdiri dari :
 - a) Tidak diperoleh bukti yang cukup.
 - b) Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.
 - c) Penghentian Penyidikan Demi Hukum
 - 1) Nebis in idem
 - 2) Tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHAP)
 - 3) Karena kadaluwarsa
2. Adapun implementasi mengenai terlaksana atau tidak terlaksananya penghentian penyidikan di Kepolisian Resort Gowa maupun Kejaksaan Negeri Sungguminasa, bahwa hasil observasi yang penulis lakukan tidak terlaksana dikarenakan penyidik atau penyelidik yang melakukan proses penyelidikan atau penyidikan telah bekerja secara professional dan berintegritas.

3. Dalam hukum pidana Islam ada beberapa jenis alat bukti yang biasa digunakan yaitu :

- a. Pengakuan (*Iqrar*)
- b. Persaksian (*syahadat*)
- c. Sumpah (*Qasamah*)
- d. Petunjuk (*Qarinah*)

pembuktian dalam hukum pidana islam tidak sama antara satu tindak pidana dengan tindak pidana yang lainnya. Hal ini disebabkan untuk tiap kasus sistem pembuktiannya berbeda didasarkan pada bentuk tindak pidananya. Yang menjadi kesamaan antara satu tindak pidana dengan tindak pidana yang lainnya dalam pembuktian adalah jenis alat bukti yang digunakannya.

Terkait dengan beban pembuktian kepada siapa harus di bebaskan, maka dalam sistem pembuktian hukum islam beban pembuktian di bebaskan kepada penggugat. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu diambil dari lahirnya. Karenanya dalam hal ini penggugat harus membuktikan apa yang telah ia gugat. Demikian pembuktian dalam hukum pidana islam, Apabila gugatan tersebut tidak dapat dibuktikan maka meskipun apa yang gugatan sebenarnya memang terjadi atau merupakan fakta maka tergugat tidak dapat dihukum.

B. Saran

Setelah menarik simpulan seperti diuraikan di atas, maka Penulis memberikan saran yaitu

1. Perlunya ditingkatkan profesionalisme dan tingkat pendidikan penyidik setara dengan strata satu bidang ilmu hukum agar dapat meningkatkan rasa keadilan dalam penerapan hukum.
2. Perlunya KUHAP ditegakkan secara benar sehingga keputusan penyidik dalam melanjutkan pemeriksaan mengandung kepastian hukum dan mengayomi masyarakat. Untuk itu perlu ada badan yang mengawasi atau dilakukan pengawasan terhadap perkara yang diperiksa.

Daftar Pustaka

- Al-Buhari, Imam. *Sahih Buhari*. Juz. VIII. Beirut: Dar al-Kitab al-Islamiyah, 1992
- Ardian, Arie. *Harapan dan Tantangan Paradigma Baru Polri*. ed. Bambang Budiono. Surabaya: Pusham Unair, 2005.
- Daeng Mapuna, Hadi. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Makassar : Alauddin University Press, 2013.
- Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Intermasa, 1993.
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah (upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Haliman, Uhat. *Hukuman Pidana Syariah Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia edisi kedua*. Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan Edisi Kedua*. Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Hiariej, Eddy O.S, *Teori dan hukum Pembuktian*. Jakarta : Erlangga, 2012.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Anggota Polri: Buku Saku*. Jakarta: Polri, 2001.
- KUHAP dan KUHP. Jakarta : sinar grafika, 2011.
- Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers 2013

- Marpaung, Leden. *asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Prayugo, Soesilo. *Kamus hukum internasional dan Indonesia*. wacana intelektual, 2007.
- Rahardi, Pudi. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Th. 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Citra Media Wacana, 2009.
- RM Suharto. *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2004
- Rusyd, Ibn. *Bidayah al-Mujtahid, juz II*. Mesir: Mustafa al-Babiy alHalâbiy, 1960
- R.Soesilo, *Taktik dan Tehnik Penyidikan Perkara criminal*, Bogor : Politeia, 1980.
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta : Fajar Interpretama Mandiri 2013.
- Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan sampai Persidangan*. Jakarta : PT. Prestasi Pustakaraya, 2010
- Triwulan, Titik Tutik. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2006.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Hukum Pidana Islam*, cet.1. Jakarta: Sinar Grafika. 2005
- W. Bawengan, Gerson, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1977.